

PEMBERDAYAAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK JAWA BARAT*

Muh. Kadarisman**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Selatan
Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Jakarta Selatan 15419

Abstract

Organisation performance is of the utmost importance, as through performance the degree of achievement can be seen. Such achievement must be in accordance with the pre-determined mission as a ground to complete the tasks. This study aims to learn the effect of empowerment towards the performance of Depok City Legislation Council. This study employs a quantitative approach and the path analysis model. The research results shows: (1) the effect of the empowerment to DPRD performance is significant, (2) the effect of a collaborative team on DPRD performance is not significant, (3) the effect of the superior on DPRD performance is not significant, and (4) the effect of communication effort on the DPRD performance is not significant.

Keywords: *empowerment, performance, member of Depok City Legislation Council.*

Intisari

Kinerja suatu organisasi sangat penting, karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat. Tingkat pencapaian tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberdayaan atas kinerja DPRD Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta analisis jalur (*path analysis*). Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa pengaruh pemberdayaan atas kinerja DPRD signifikan, pengaruh tim yang mampu kerjasama atas kinerja Anggota DPRD tidak signifikan. Pengaruh pimpinan atas kinerja Anggota DPRD tidak signifikan, dan pengaruh komunikasi atas kinerja Anggota DPRD tidak signifikan.

Kata Kunci: pemberdayaan, kinerja, Anggota DPRD Kota Depok.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	300
B. Metode Penelitian	302
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	302
1. Analisa Faktor-Faktor Pemberdayaan Anggota DPRD	302
2. Analisis Kinerja Anggota DPRD Kota Depok	305
3. Analisis Hubungan Antara Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dengan Kinerja Anggota DPRD	307
4. Pengaruh Pemberdayaan Anggota DPRD Kota Depok terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Depok.....	310
D. Kesimpulan	316

* Hasil Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010.

** Alamat korespondensi: kadarisman.bkn@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Wacana pemerintahan yang desentralistik, sebenarnya bukanlah semata-mata fenomena lokal Indonesia. Sejumlah ahli dan futurolog menyebut bahwa pemerintahan masa depan di dunia, salah satunya adalah dicirikan oleh karakter desentralisasi atau otonomi daerah yang lebih luas.¹ Dengan kebijakan desentralisasi diharapkan dapat diakomodasikan secara sekaligus dua tuntutan yang sekarang sedang tumbuh dan meluas dalam masyarakat. Hadirnya sebuah pemerintahan yang lebih demokratis, yang antara lain ditandai dengan semakin terbukanya kesempatan bagi publik untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik (*public policy making process*), semakin meningkatkan transparansi dan responsibilitas penyelenggaraan pemerintahan, baik yang berkaitan dengan tugas pelayanan publik (*public service*), pembangunan (*development*), maupun pemberdayaan (*empowerment*). Secara normatif, hal mendasar yang membedakan antara UU No. 32 Tahun 2003 dengan UU No. 5 Tahun 1974 adalah pemberdayaan secara struktural lembaga legislatif daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemberdayaan secara struktural lembaga DPRD adalah pembesaran kewenangan atau kekuasaan DPRD yang diberikan oleh suatu Undang-undang atau kebijakan pemerintah. Guna memperoleh pemahaman, maka dalam pembahasan, pemberdayaan secara struktural akan dikontraskan dengan pemberdayaan secara individu anggota DPRD, artinya peningkatan kemampuan atau kekuasaan DPRD sebagai lembaga legislatif melalui peningkatan kemampuan individu-individu anggota DPRD. Berbeda dengan Undang-undang sebelumnya (UU No. 5 Tahun 1974) yang memasukkan lembaga legislatif daerah (DPRD) sebagai bagian dari pemerintah daerah bersama-sama dengan kepala daerah, atau yang secara defakto DPRD berada di

bawah kekuasaan kepala daerah meskipun secara *de jure* adalah sejajar. Kini setelah berlaku UU No. 32 Tahun 2003, bergeser menjadi hubungan kekuasaan yang sejajar (*equal*) dan terpisah sama sekali dengan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam konstruksi struktural yang demikian, diharapkan mekanisme *check and balance* dapat lebih terbuka kemungkinannya untuk dilaksanakan dengan baik, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat memenuhi tuntutan akan nilai-nilai demokrasi, efektivitas dan efisiensi.

Pemberdayaan (*empowerment*) DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, diharapkan dapat menciptakan mekanisme *check and balance* yang lebih efektif antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Penyelenggaraan pemerintahan di bawah UU No. 5 Tahun 1974, mekanisme *check and balance* di antara kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidakberdayaan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Secara normatif pemberdayaan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah diasumsikan akan membawa beberapa keuntungan yang dapat menunjang terwujudnya tujuan otonomi daerah. **Pertama**, karena posisinya yang lebih dekat dengan rakyat, maka DPRD yang berdaya membuka kesempatan dan peluang yang lebih besar bagi rakyat daerah untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan daerah yang dibuat oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah. **Kedua**, memungkinkan terjadinya kontrol sosial dari masyarakat yang lebih besar, baik dari masyarakat kepada DPRD, maupun dari masyarakat dan DPRD kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan meningkatnya kontrol ini, diharapkan dimensi efektivitas dan efisiensi dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat ditingkatkan.

Ketiga, berkaitan dengan point kedua tentang penguatan kontrol sosial juga dapat mendorong

¹ Lebih lanjut lihat David Osborne, *et al.*, 1992, *Reinventing Government How The Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Addison-Wesley Publishing Company, New York.

transparansi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. **Keempat**, mendorong semakin jelasnya mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada rakyat setempat. Dapat dikatakan bahwa secara normatif pemberdayaan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dapat mendorong sekaligus dua nilai yang ingin diwujudkan dalam otonomi daerah. Nilai yang ingin diwujudkan tersebut adalah peningkatan dimensi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan dimensi efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sekalipun demikian, pemberdayaan DPRD secara struktural (perluasan atau pembesaran kewenangan formal yang diberikan Undang-undang) tersebut tidaklah dengan sendirinya menjamin terjadinya keberdayaan DPRD. Artinya, pemberdayaan struktural tersebut dalam kenyataannya tidaklah secara otomatis akan diikuti dengan terjadinya peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara lebih baik. Hal tersebut dikarenakan pada akhirnya peluang yang disediakan oleh pembesaran kewenangan formal yang diberikan undang-undang, akan tergantung pada sejauh mana kemampuan individu DPRD dalam memanfaatkan dan menggunakan secara optimal peluang tersebut. Di samping itu, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, juga turut dipengaruhi oleh dukungan organisasional dari sekretariat DPRD dalam bentuk seperti tenaga ahli, data dan informasi.

Dengan demikian, tidak dengan sendirinya pemberdayaan DPRD secara struktural melalui pembesaran kewenangannya membawa kontribusi positif bagi pelaksanaan otonomi daerah, apalagi tanpa dibarengi dengan peningkatan keberdayaan individu anggota DPRD dan dukungan organisasional sekretariat DPRD. Dengan demikian, secara ideal pemberdayaan DPRD akan dapat terwujud dan membawa implikasi yang positif bagi masa depan pelaksanaan otonomi daerah. Apabila proses pemberdayaan DPRD tersebut merupakan sinergi antara pemberdayaan

secara struktural (penambahan kewenangan kelembagaan melalui Undang-undang), dan peningkatan kualitas dan kompetensi individu anggota DPRD, serta dukungan organisasional dari lembaga sekretariat DPRD. Di samping itu, agar pemberdayaan DPRD benar-benar diarahkan untuk mendukung terbangunnya pemerintahan yang lebih demokratis dan melayani masyarakat, maka juga diperlukan kontrol sosial dari masyarakat. Dalam kenyataannya, nampaknya pemberdayaan DPRD secara struktural yang diberikan oleh Undang-undang di Kota Depok Jawa Barat belum maksimal menunjukkan sinergi dengan aspek-aspek pemberdayaan lainnya misalnya pemberdayaan individual, pemberdayaan organisasi pendukung, kontrol sosial dan lain-lain, sehingga belum menunjukkan kinerja DPRD yang optimal yang pada akhirnya nampaknya kurang memberikan dukungan yang optimal terhadap otonomi daerah Kota Depok.

Dalam melaksanakan berbagai aspek fungsinya, kinerja DPRD masih menunjukkan kecenderungan kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari topik pembicaraan di media massa terbitan lokal dan radio swasta lokal yang banyak menyorot tentang kinerja DPRD. Masyarakat mempertanyakan kemampuan anggota dewan dalam melaksanakan dan menggunakan hak-hak yang dimiliki DPRD, terutama tindak lanjut berbagai aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPRD. Anggota DPRD harus mempunyai kemampuan yang general spesialis, artinya setiap anggota DPRD dituntut untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara meliputi segala aspek kehidupan. Namun, di sisi lain juga harus ahli di bidangnya yakni pemerintahan. Dari kualitas yang telah dimiliki, tentunya akan menciptakan suatu kinerja birokrasi publik dalam hal ini anggota DPRD yang baik dan efektif. Dalam kaitan ini Agus Dwiyanto mengemukakan bahwa:

Kajian mengenai kinerja birokrasi publik, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan faktor-faktor

yang ikut membentuk kinerja birokrasi tentu amat penting untuk diketahui agar kebijakan yang holistik untuk memperbaiki kinerja bisa dirumuskan. Tanpa didasarkan pada informasi yang akurat dan reliabel, kebijakan reformasi birokrasi tidak akan mampu menyentuh semua dimensi persoalan yang selama ini menghambat upaya perbaikan kinerja birokrasi publik. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi tidak pernah mampu menghasilkan perubahan yang berarti. Hal ini terjadi karena kebijakan tersebut gagal menyelesaikan berbagai masalah yang selama ini ikut memberikan kontribusi pada rendahnya kinerja birokrasi.²

Atas pendapat tersebut menunjukkan bahwa diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari setiap anggota DPRD Kota Depok, demi optimalisasi bidang tugas yang diembannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat. Dengan demikian akan diketahui, seberapa jauh tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja masing-masing anggota DPRD akan berakibat pada kinerja organisasi yang telah dilaksanakan. Dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut, seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, adakah pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja Anggota DPRD Kota Depok.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini populasinya adalah para Anggota DPRD Kota Depok. Sedangkan teknik penentuan sampel atau unit observasi dilakukan secara sensus terhadap Anggota DPRD. Dengan

pengambilan sampel secara keseluruhan sebagai responden yang terdapat pada populasi, hal tersebut dengan alasan bahwa populasi cukup kecil serta wilayah observasi yang cukup sempit. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei langsung ke lapangan, melalui wawancara (*interview*) kepada para anggota DPRD Kota Depok yang dipilih secara acak. Terhadap responden tersebut, pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya, terhadap unsur pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua DPRD) pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara.³ Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku/referensi, laporan hasil penelitian, jurnal, tulisan, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan topik/permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan dengan Analisis Jalur (*Path Analysis*) melalui analisis regresi yang telah dibakukan.⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisa Faktor-Faktor Pemberdayaan Anggota DPRD

a. Terfokus pada Kinerja

Faktor utama dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota DPRD Kota Depok, setiap personel harus memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut merupakan sikap dan perilaku Anggota DPRD Kota Depok yang mampu dan handal serta berpengetahuan luas dalam bidangnya yang diharapkan dapat melakukan pekerjaannya dalam memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan Pemerintah Kota Depok sesuai dengan bidang tugas yang digelutinya. Anggota DPRD Kota Depok yang profesional akan menjadi handal dalam bertugas dan akan menghasil-

² Lebih lanjut lihat Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

³ Lebih lanjut lihat John W. Creswell, 2002, *Research Design: Quantitative & Qualitative Approaches*. Sage Publication Inc., New York.

⁴ Lebih lanjut lihat Kusnendi, 2004, *Analisis Jalur, Konsep, dan Aplikasi dengan Program SPSS dan Lisrel 8*, Jurusan Pendidikan Ekonomi UPI, Bandung.

kan kerja yang bermutu tinggi, sehingga mampu mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Depok. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa aspek terfokus pada kinerja DPRD Kota Depok, untuk poin pernyataan memperbaiki hubungan dengan rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota DPRD Kota Depok memberikan jawaban, yaitu 12 orang (30,8%) menyatakan setuju, dan 10 orang (25,6%) menyatakan sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden (56,4%) memberikan persetujuannya terhadap harus diperbaikinya hubungan antara Anggota DPRD Kota Depok dengan rakyat atau masyarakat yang telah memilihnya.

Berhubung dengan terfokusnya pada kinerja DPRD Kota Depok, hal ini merupakan perwujudan profesionalisme yang dimiliki oleh Anggota DPRD Kota Depok. Selanjutnya, untuk poin pernyataan memperbaiki hubungan dengan pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan tugas menunjukkan 11 orang (28,2%) menyatakan sangat setuju dan 11 orang (28,2%) menyatakan setuju. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa aspek terfokus pada kinerja DPRD Kota Depok, untuk poin pernyataan memperbaiki hubungan dengan rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota DPRD Kota Depok memberikan jawaban yaitu 12 orang (30,8%) menyatakan setuju, dan 10 orang (25,6%) menyatakan sangat setuju.

b. Tim yang Mampu Kerja Sama

Kerja sama merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mau dan dapat berada dalam tim yang mempunyai pandangan yang sama. Tidak ada satu pun organisasi yang dapat mencapai tujuannya tanpa melalui kerja sama yang baik. Kerja sama itu sendiri merupakan hubungan yang serasi antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga tercipta hubungan yang saling membantu demi tercapainya tujuan. Hubungan yang harmonis antar sesama Anggota DPRD Kota Depok dengan

masyarakat yang diwakilinya, mutlak dibutuhkan pada DPRD Kota Depok. Hal tersebut dimaksudkan agar mampu mencapai tujuan dan sasarannya sebagai organisasi yang menjadi penyeimbang dan pengontrol kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok Jawa Barat. Dapat ditunjukkan bahwa penilaian responden terhadap poin pernyataan terkait hubungan kerja yang baik antara sesama Anggota DPRD Kota Depok menunjukkan 15 orang (38,5%) menyatakan sangat setuju, 16 orang (41,0%) menyatakan setuju. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menyatakan hubungan kerja yang baik akan dapat melancarkan tugas-tugas yang diembannya dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya kerja sama antar Anggota DPRD Kota Depok tersebut akan berakibat pada terbentuknya tim yang mampu kerja sama dalam setiap aspek tugas dan kewenangan Anggota DPRD Kota Depok. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kota Depok diketahui bahwa para Anggota DPRD Kota Depok menyadari betapa pentingnya suatu kerja sama yang baik di dalam organisasinya. Dengan kerja sama tersebut, akan dapat melancarkan tugas yang diberikan kepada Anggota DPRD Kota Depok dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga legislatif di daerah. Sehubungan dengan kerja sama secara intern di DPRD Kota Depok, juga untuk poin pernyataan adanya kerja antara Anggota DPRD Kota Depok dengan pemerintah daerah menunjukkan 11 orang (28,2%) menyatakan sangat setuju dan 17 orang (43,6%) menyatakan setuju. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menilai dalam lembaga legislatif daerah Kota Depok tersebut, ternyata para Anggota DPRD-nya telah terjalin adanya hubungan kerja dengan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan produk perundangan yang akan dijadikan acuan oleh eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahannya. Jalinan kerja tersebut dalam bentuk pengolahan peraturan

daerah secara bersama-sama dengan aparat pemerintah terkait, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat diimplementasikan oleh eksekutif sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai pengguna.

c. Pimpinan yang Mempunyai Visi

Terkait hasil penilaian responden terhadap aspek pimpinan yang mempunyai visi pada DPRD Kota Depok. Untuk poin pernyataan adanya kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Depok kepada pimpinannya menunjukkan 10 orang (25,6% menyatakan sangat setuju dan 12 orang (30,8%) menyatakan setuju. Hal ini berkaitan dengan kepemimpinan yang merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Kepemimpinan adalah proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan data tersebut di atas, dapat memberikan gambaran bahwa kepercayaan Anggota DPRD Kota Depok terhadap pimpinannya bisa dijadikan modal untuk pembangunan DPRD Kota Depok yang tangguh dan mempunyai visi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan misi untuk memberikan yang terbaik bagi pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

Kepercayaan terhadap individu-individu yang menempati posisi manajerial yang sangat penting mempunyai korelasi langsung dan positif dengan harapan-harapan manajemen puncak bahwa strategi dapat dilaksanakan dengan sukses. Karakteristik-karakteristik pemimpin tertentu yang mungkin dapat dipertimbangkan meliputi kemampuan dan pendidikan, riwayat dan pengalaman kerja sebelumnya, dan kepribadian dan temperamen. Masalah penting adalah bagaimana memadukan karakteristik-karakteristik para manajer tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan implementasi strategi. Dalam hal lain, responden memberikan pernyataan yang tidak jauh berbeda untuk poin bahwa pimpinan tidak mempedulikan

kesempatan yang dapat memperdayakannya, yaitu sebanyak 14 orang (35,9%) menyatakan sangat setuju dan 12 orang (30,8%) menyatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian anggota DPRD Kota Depok percaya, bahwa pimpinannya baik pimpinan DPRD Kota Depok, pimpinan komisi maupun fraksi di DPRD Kota Depok memiliki tingkat idealisme yang cukup sehingga mereka tidak mempedulikan setiap kesempatan yang dapat memperdayakan mereka. Salah satu karakteristik pemimpin pemerintahan adalah tanggap terhadap kondisi politik baik organisasi pemerintahan maupun dalam masyarakat.

Selanjutnya, memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik, saran dan mungkin juga pengawasan yang datang dari masyarakat, serta tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Pemimpin harus banyak menghabiskan banyak waktu dalam urusan menerima dan menyebarkan informasi. Pemimpin di sini memiliki tiga fungsi yaitu sebagai pengawas (*monitor*), untuk mendapatkan informasi yang valid. Pemimpin harus melakukan pengamatan secara kontinyu terhadap lingkungannya yakni terhadap bawahan, atasan dan selalu hubungan dengan baik dengan pihak luar. Sebagai penyebar (*disseminator*), pemimpin harus mampu menyebarkan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Sebagai juru bicara (*spokesperson*), sebagai juru bicara, pemimpin berfungsi untuk menyatakan informasi bagi pihak luar. Dari fungsi-fungsi tersebut, yaitu sebanyak 10 orang (25,6%) menyatakan sangat setuju dan 15 orang (38,5%) menyatakan setuju bahwa pimpinan DPRD Kota Depok melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang telah disepakati dan disetujui oleh seluruh Anggota DPRD Kota Depok.

d. Komunikasi yang Baik

Berdasarkan jawaban responden untuk poin pernyataan Anggota DPRD Kota Depok mengetahui apa yang sedang terjadi di DPRD

Kota Depok dapat diketahui 17 orang (43,6%) menyatakan sangat setuju, 16 orang (41,0%) menyatakan setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa Anggota DPRD Kota Depok mengetahui apa yang sedang terjadi di DPRD Kota Depok. Hal tersebut dapat dipahami karena adanya upaya yang terus dilakukan agar seluruh Anggota DPRD Kota Depok selalu dapat memperbaharui informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangannya. Sistem informasi manajemen organisasi pemerintah tidak terkecuali DPRD Kota Depok yang berkaitan dengan sosialisasi suatu program/kebijakan DPRD Kota Depok kepada para anggotanya, adalah tindakan formal birokrasi DPRD Kota Depok dengan menunjukkan karakteristik pelayanan kepada Anggota DPRD Kota Depok yaitu dengan surat dinas yang bersangkutan kepada komisi dan fraksi yang ada di DPRD Kota Depok. Selanjutnya melalui suatu pertemuan dengan Anggota DPRD Kota Depok, yang penting dalam hal ini sasaran program bisa tepat guna dan tidak keluar dari konteks pokoknya. Dalam hal ini responden memberikan persetujuannya melalui pernyataan yang berkaitan dengan para Anggota DPRD Kota Depok selalu mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, yaitu sebanyak 11 orang (28,2%) menyatakan setuju dan 17 orang (43,6%) menyatakan setuju.

2. Analisa Kinerja Anggota DPRD Kota Depok

a. Akuntabilitas

Jawaban responden pada kuesioner mengenai aspek akuntabilitas pada Anggota DPRD Kota Depok dapat dikemukakan bahwa hasil penilaian responden terhadap aspek akuntabilitas untuk poin pernyataan adanya acuan dalam melakukan tugasnya sebanyak 10 orang (24,4%) menyatakan sangat setuju dan 12 orang (29,3%) menyatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden setuju Anggota DPRD Kota Depok dalam melaksanakan tugasnya

mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hal tersebut berarti bahwa pelaksanaan tugas yang selama ini dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Depok berdasarkan pada aturan petunjuk pelaksanaan, meskipun pernyataan tersebut bukan pernyataan dominan yang disampaikan oleh responden. Hasil penilaian responden tersebut, diperkuat dengan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kota Depok yang dengan jelas menyatakan bahwa para Anggota DPRD Kota Depok melakukan pekerjaannya sehari-hari di dalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang pada aturan-aturan yang berlaku.

Selain itu juga, Anggota DPRD Kota Depok akan berpegang pada kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Dengan berpegangnya pada aturan yang berlaku, berarti Anggota DPRD Kota Depok dapat dikatakan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas yang rendah juga dapat dilihat dari poin pernyataan prioritas pada kepentingan masyarakat, yaitu 11 orang (26,8%) menyatakan sangat setuju dan 13 orang (31,7%) menyatakan setuju. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju jika saat ini dalam menjalankan tugasnya para Anggota DPRD Kota Depok memprioritaskan kepentingan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penerimaan Anggota DPRD Kota Depok kepada masyarakat, walaupun masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh aparat pemerintah.

b. Responsivitas

Untuk melihat bagaimana responsivitas Anggota DPRD Kota Depok, berikut dikemukakan bahwa hasil penilaian responden terhadap aspek responsivitas untuk poin pernyataan adanya saluran komunikasi untuk menampung aspirasi Pemerintah Daerah Kota Depok dan masyarakat yaitu 15 orang (36,6%) menyatakan sangat setuju dan 16 orang (39,0%) menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden merasakan adanya saluran komunikasi untuk menampung aspirasi yang datangnya dari

Pemerintah Daerah Kota Depok dan masyarakat atau kebutuhan lainnya dengan tugas anggota DPRD Kota Depok. Saluran komunikasi ini sangat diperlukan bagi masyarakat agar mereka dapat menyalurkan aspirasi atau kebutuhan yang diharapkan. Sedang bagi DPRD Kota Depok merupakan sarana untuk menerima saran, kritik dan keluhan masyarakat. Atas dasar pernyataan adanya berbagai upaya untuk mengenali dan memahami kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Depok dan masyarakatnya dapat diketahui bahwa 11 orang (26,6%) menyatakan sangat setuju dan 17 orang (41,5%) menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan adanya suatu upaya yang dilakukan Anggota DPRD Kota Depok di dalam mengenali dan memahami kebutuhan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan Anggota DPRD Kota Depok dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kota Depok yang membidangi kesejahteraan masyarakat. Diungkapkan bahwa usaha atau upaya DPRD Kota Depok di dalam mengenali dan memahami kebutuhan masyarakat dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat baik secara formal maupun informal. Hal ini didukung dengan keberadaan masyarakat yang berada di DPRD Kota Depok. Dengan adanya kedekatan hubungan antara masyarakat dan Anggota DPRD Kota Depok, maka akan sangat mudah untuk merespon kebutuhan masyarakat, sehingga perasaan segan dan takut pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dapat dihilangkan. Selain itu diketahui juga bahwa kebutuhan masyarakat tidak sekedar untuk dikenali dan dipahami, tetapi masyarakat Kota Depok mengharapkan adanya realisasi dari tuntutan kebutuhannya. Tindak lanjut dari tuntutan dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Depok serta masyarakatnya, maka untuk poin pertanyaan adanya tindak lanjut terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat diketahui bahwa 18 orang (43,9%) menyatakan sangat setuju dan 13 orang (31,7%) menyatakan setuju. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden

merasakan adanya tindak lanjut terhadap tuntutan dan kebutuhannya.

c. Efisiensi

Kinerja DPRD Kota Depok dari aspek efisiensi dapat dilihat dari hasil penilaian responden. Atas dasar penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa aspek efisiensi untuk poin pernyataan adanya penetapan standar waktu pelayanan menunjukkan 10 orang (4,4%) menyatakan sangat setuju dan 12 orang (29,3%) menyatakan setuju. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar responden menilai telah adanya standar waktu yang ditetapkan oleh DPRD Kota Depok di dalam menyelesaikan tugasnya. DPRD Kota Depok telah menetapkan standar waktu di dalam menyelesaikan tugasnya baik untuk tugas-tugas kesehariannya maupun tugas-tugas dalam memproses setiap aspirasi yang datang dari masyarakat dan pemerintah daerah.

d. Orientasi terhadap Tugas

Terkait dengan penilaian responden terhadap kinerja Anggota DPRD Kota Depok dari aspek orientasi terhadap tugas, bahwa untuk poin pernyataan terpenuhinya kebutuhan Anggota DPRD Kota Depok dalam melaksanakan tugasnya dapat diketahui 17 orang (41,5%) menyatakan sangat setuju, dan 16 orang (39,0%) menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai para Anggota DPRD Kota Depok telah terpenuhi kebutuhannya di dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dan memberikan pelayanan kepada Pemerintah Daerah Kota Depok dan masyarakat. Hasil wawancara dengan Anggota DPRD Kota Depok dikatakan bahwa para anggota telah berusaha untuk memberikan perhatian terhadap setiap tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Anggota DPRD Kota Depok menyadari akan tugas pokok dan fungsinya sebagai Anggota DPRD Kota Depok yaitu memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat yang telah mempercayainya sebagai wakil dan mempunyai suara untuk turut menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok yang berpihak pada rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian responden terhadap Anggota DPRD Kota Depok pada aspek orientasi terhadap tugas untuk poin pernyataan Anggota DPRD Kota Depok selalu berada di tempat kerja untuk dapat menampung setiap aspirasi yang datang dari masyarakatnya yaitu 11 orang (26,6%) menyatakan sangat setuju dan 17 orang (41,5%) menyatakan setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai Anggota DPRD Kota Depok selalu berada di tempat kerja untuk menunaikan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan pekerjaannya. Sedangkan dalam hal perhatian Anggota DPRD Depok terhadap pelayanan, untuk poin pernyataan adanya perhatian yang cukup besar dari Anggota DPRD Kota Depok terhadap tugasnya menunjukkan bahwa 13 orang (31,7%) menyatakan sangat setuju dan 15 orang (36,6%) menjawab setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan adanya perhatian yang cukup besar dari Anggota DPRD Kota Depok terhadap penyelesaian tugasnya sebagai wakil rakyat dan pendamping Pemerintah Daerah Kota Depok dalam melaksanakan kebijakan pemerintahannya.

3. Analisa Hubungan Antara Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dengan Kinerja Anggota DPRD

a. Hubungan Antara Faktor Pemberdayaan Terfokus pada Kinerja dengan Kinerja Anggota DPRD

Dalam kaitan ini dapat dikemukakan bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan tugas dan kewenangan DPRD Kota Depok tidak terlepas dari pemberdayaan yang terfokus pada kinerja Anggota DPRD Kota Depok dalam menghasilkan kinerja yang baik pada DPRD Kota Depok. Anggota DPRD Kota Depok yang profesional akan menghasilkan kerja yang bermutu tinggi, waktu yang sesuai prosedur dan bisa diikuti oleh masyarakat yang dilayaninya. Berikut ditunjukkan uji korelasi guna mengetahui hubungan antara aspek pemberdayaan terfokus pada kinerja DPRD Kota Depok. Diketahui bahwa angka pada *output* antara pemberdayaan terfokus pada kinerja menghasilkan angka $r = 0,520$. Angka tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara pemberdayaan terfokus pada kinerja dengan kinerja (r mendekati 1). Sedang tanda '+' (r bernilai positif) menunjukkan bahwa semakin tinggi pemberdayaan terfokus pada kinerja seorang Anggota DPRD, akan semakin tinggi pula kinerjanya.

Dengan angka probabilitas 0,000 (kolom Sig. (2-tailed) berarti hubungan yang terjadi signifikan pada 1% (karena probabilitas $\leq 0,01$). Ini berarti H_0 ditolak, atau sebenarnya ada hubungan yang signifikan antara pemberdayaan terfokus pada kinerja dengan kinerja DPRD Kota Depok. Atas dasar kuesioner maupun wawancara, pemberdayaan terfokus pada kinerja Anggota DPRD Kota Depok sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut terlihat dari penguasaan yang baik

Tabel 1
Uji Korelasi *Bivariate* Antara Variabel Pemberdayaan Terfokus pada Kinerja dengan Variabel Kinerja Anggota DPRD Kota Depok
Correlations

		Kinerja	Pemberdayaan Terfokus pada Kinerja
Kinerja	<i>Pearson Correlation</i>	1	520
	<i>Sig (2-tailed)</i>	000	000
	<i>N</i>	39	39
Pemberdayaan Terfokus pada Kinerja	<i>Pearson Correlation</i>	520	1
	<i>Sig (2-tailed)</i>	000	000
	<i>N</i>	39	39

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

terhadap tugas dan pekerjaan pada setiap Anggota DPRD Kota Depok. Penguasaan pekerjaan tersebut didukung dengan adanya studi banding dan kursus yang telah diterima oleh setiap Anggota DPRD Kota Depok. Selain itu, pemberdayaan terfokus pada kinerja tercermin dari penguasaan wilayah kerja yaitu rata-rata Anggota DPRD Kota Depok telah mengenal wilayah Kota Depok. Dari segi disiplin kerja yang ditunjukkan Anggota DPRD Kota Depok bisa dikatakan baik, karena pimpinan Anggota DPRD Kota Depok telah menerapkan disiplin yang baik terhadap diri dan Anggota DPRD Kota Depok. Dengan adanya penguasaan baik pekerjaan maupun wilayah kerja yang didukung disiplin yang baik, maka hal tersebut akan memberi pengaruh positif terhadap kinerja DPRD Kota Depok.

b. Hubungan Antara Tim yang Mampu Kerjasama dengan Kinerja Anggota DPRD

Dalam kaitan ini, bahwa kerjasama tim merupakan suatu hal yang sangat penting dan cukup menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi, sehingga di dalam tim tersebut dibutuhkan orang-orang yang mau dan mempunyai pandangan yang sama. Tidak ada satu pun organisasi yang dapat mencapai tujuannya tanpa melalui kerjasama tim yang baik. Kerjasama itu sendiri adalah hubungan yang serasi antara satu orang dengan orang lainnya sehingga tercipta hubungan yang saling membantu demi tercapainya

tujuan. Hubungan yang harmonis antar sesama Anggota DPRD Kota Depok, Anggota DPRD Kota Depok dengan masyarakat yang diwakilinya, mutlak dibutuhkan pada DPRD Kota Depok, agar mampu mencapai tujuan dan sasarannya sebagai organisasi yang menjadi penyeimbang dan pengontrol kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Selanjutnya, ditunjukkan hasil uji korelasi antara aspek tim yang mampu kerjasama dengan kinerja DPRD Kota Depok. Diketahui bahwa angka pada *output* adalah $r = 0,556$ yang berarti ada hubungan yang erat antara tim yang mampu kerjasama dengan kinerja (r mendekati 1). Untuk tanda '+' (r bernilai positif) menggambarkan semakin bagus tim yang mampu kerjasama dalam menjalankan tugasnya akan semakin tinggi pula kinerjanya.

Terdapatnya hubungan antara kedua variabel dapat juga dilihat dari angka probabilitasnya yaitu 0,000 (kolom Sig. (2-tailed)) yang berarti hubungan yang terjadi signifikan pada 1% (karena probabilitas $< 0,01$). Hal ini berarti H_0 ditolak, atau sebenarnya ada hubungan yang signifikan antara tim yang mampu kerjasama dengan kinerja DPRD Kota Depok. Pada DPRD Kota Depok, kerjasama antara satu anggota dengan anggota dewan lainnya merupakan satu ketentuan yang harus diikuti oleh setiap anggotanya. Dengan pelaksanaan tugas dengan hak-hak tertentu, DPRD Kota Depok mempunyai beberapa panitia kecil yang anggotanya terdiri Anggota DPRD Kota Depok yang

Tabel 2
Uji Korelasi *Bivariate* Antara Variabel Tim yang Mampu Kerjasama dengan Variabel Kinerja Anggota DPRD Kota Depok
Correlations

		Kinerja	Pemberdayaan Terfokus pada Kinerja
Kinerja	<i>Pearson Correlation</i>	1	520
	<i>Sig (2-tailed)</i>	000	000
	<i>N</i>	39	39
Pemberdayaan Terfokus pada Kinerja	<i>Pearson Correlation</i>	556	1
	<i>Sig (2-tailed)</i>	000	000
	<i>N</i>	39	39

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

berasal dari seluruh fraksi dengan penetapan jumlah anggota berdasarkan beberapa ketentuan yang berlaku sesuai Undang-undang. Dengan adanya tim yang mampu kerjasama tersebut membuat Anggota DPRD Kota Depok menjadi lebih kuat dan solid, dalam menyelesaikan setiap tugas yang diembannya. Dalam hal ini baik tugas legislasi yang bergandengan dengan Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai eksekutif pemerintahan, maupun dalam menindaklanjuti aspirasi yang datangnya dari masyarakat. Sehingga hal ini memberi pengaruh yang baik terhadap kinerja DPRD Kota Depok.

c. Hubungan Antara Pemimpin yang Mempunyai Visi dengan Kinerja Anggota DPRD Kota Depok

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi memerlukan dukungan pemimpin yang mempunyai visi organisasi. Pemimpin yang mempunyai visi organisasi dapat memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing Anggota DPRD Kota Depok dalam organisasi, sehingga kinerja DPRD Kota Depok akan semakin baik. Bagaimana hubungan antara aspek pemimpin yang mempunyai visi dengan kinerja DPRD Kota Depok, diketahui bahwa angka pada *output* antara kedua variabel adalah $r = 0,130$. Angka tersebut menunjukkan tidak terdapat keeratan hubungan antara pemimpin yang mempunyai visi dengan kinerja (r mendekati 0). Untuk signifikansinya, pada bagian kedua *output* (kolom Sig. (2-tailed),

untuk korelasi kedua variabel didapat angka probabilitas 0,252. Oleh karena angka tersebut di atas 0,05 (probabilitas > 0,05), maka H_0 diterima atau sebenarnya tidak ada hubungan yang signifikan antara pemimpin yang mempunyai visi dengan kinerja DPRD Kota Depok. Saat ini DPRD Kota Depok telah memiliki pemimpin yang mempunyai visi organisasi yang jelas dan sepenuhnya terisi oleh personil Anggota DPRD Kota Depok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pendelegasian wewenang, DPRD Kota Depok telah memberikan wewenang kepada Anggota DPRD Kota Depok yaitu dengan adanya komisi-komisi yang disesuaikan dengan bidang yang ditangani oleh DPRD Kota Depok. Sehingga dengan jumlah DPRD Kota Depok yang ada seluruh bidang yang ditangani oleh DPRD Kota Depok telah mampu dikelola. Hal tersebut membuat kerja pelayanan di DPRD Kota Depok berjalan sebagaimana biasanya. Dengan demikian DPRD Kota Depok dengan pemimpin yang mempunyai visi dan Anggota DPRD Kota Depok yang ada, tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kinerja DPRD Kota Depok. Jika tidak didukung oleh kemampuan dan kerjasama tim DPRD Kota Depok yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa kegiatan legislasi dan pelayanan kepada Pemerintah Daerah Kota Depok serta masyarakat akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan

Tabel 3
Uji Korelasi *Bivariate* Antara Variabel Pemimpin yang Mempunyai Visi dengan Variabel Kinerja Anggota DPRD Kota Depok
Correlations

		Kinerja	Pemberdayaan Terfokus pada Kinerja
Kinerja	<i>Pearson Correlation</i>	1	130
	<i>Sig (2-tailed)</i>	000	252
	<i>N</i>	39	39
Pemberdayaan Terfokus pada Kinerja	<i>Pearson Correlation</i>	130	1
	<i>Sig (2-tailed)</i>	252	000
	<i>N</i>	39	39

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

peraturan perundang-undangan meskipun pimpinan DPRD Kota Depok kurang memiliki visi dalam kepemimpinannya.

d. Hubungan Antara Komunikasi yang Baik dengan Kinerja Anggota DPRD Kota Depok

Dapat dikemukakan bahwa komunikasi yang baik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, komunikasi yang baik dibutuhkan karena kompleksnya pekerjaan atau kegiatan organisasi. Untuk mengetahui hubungan antara variabel komunikasi yang baik dengan variabel kinerja DPRD Kota Depok, dapat dikemukakan bahwa angka pada *output* antara komunikasi yang baik dengan kinerja adalah $r = 0,543$. Angka tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara kedua variabel (r mendekati 1), sedang tanda '+' (r bernilai positif) menunjukkan bahwa semakin kuat komunikasi yang baik, akan semakin tinggi pula kinerjanya. Pada bagian kedua *output* (kolom Sig. (2-tailed)), untuk korelasi variabel komunikasi yang baik dengan variabel kinerja didapat angka probabilitas 0,000 yang berarti hubungan yang terjadi signifikan pada 1% (karena probabilitas $< 0,01$).

Dengan demikian H_0 ditolak atau sebenarnya ada hubungan yang signifikan antara komunikasi yang baik dengan kinerja Anggota DPRD Kota Depok. Di DPRD Kota Depok telah terjalin komunikasi yang baik yang terjadi antara sesama

Anggota DPRD Kota Depok maupun antara anggota dengan pimpinan DPRD Kota Depok. Hal tersebut terlihat dari adanya sikap saling membantu sesama Anggota DPRD Kota Depok dalam menyelesaikan pekerjaan dan juga terlihat dari adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara Anggota DPRD Kota Depok dengan pimpinan. Dengan adanya komunikasi yang baik tersebut, tentunya akan memberi pengaruh yang baik pula terhadap pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar yang berakibat kinerja DPRD Kota Depok tersebut dapat berjalan dengan lancar dan kinerja DPRD Kota Depok menjadi semakin baik.

4. Pengaruh Pemberdayaan Anggota DPRD Kota Depok terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Depok

Analisis jalur terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bahwa variabel yang diteliti terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (Pemberdayaan Anggota DPRD Kota Depok (X)). Variabel bebas ini mempunyai empat dimensi yaitu 1. Pemberdayaan terfokus pada kinerja; 2. Tim yang mampu kerjasama; 3. Pemimpin yang mempunyai visi; dan 4. Komunikasi yang baik. Sedangkan variabel terikat, yaitu Kinerja Anggota DPRD Kota Depok (Y). Variabel residu (*residual variable*), yaitu variabel lain di luar variabel X yang mempengaruhi variabel Y dan tidak diukur (Σ). Dalam analisis ini

Tabel 4
Uji Korelasi Bivariate Antara Variabel Komunikasi yang Baik dengan Variabel Kinerja Anggota DPRD Kota Depok

		Kinerja	Pemberdayaan Terfokus pada Kinerja
Kinerja	<i>Pearson Correlation</i>	1	543**
	<i>Sig (2-tailed)</i>	000	000
	<i>N</i>	39	39
Pemberdayaan Terfokus pada Kinerja	<i>Pearson Correlation</i>	543**	1
	<i>Sig (2-tailed)</i>	000	000
	<i>N</i>	39	39

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

akan dikemukakan mengenai besarnya pengaruh tiap dimensi dalam variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Hubungan X_1 terhadap variabel Y, hubungan X_2 terhadap variabel Y, hubungan X_3 terhadap variabel Y, hubungan X_4 terhadap variabel Y. Menunjukkan hubungan kualitas. Sedangkan hubungan X_1 dengan X_2 , hubungan X_1 dengan X_3 , hubungan X_1 dengan X_4 , hubungan X_2 dengan X_3 , hubungan X_2 dengan X_4 , dan hubungan X_3 dengan X_4 menunjukkan hubungan korelasional.

Pengaruh variabel X gabungan dari X_1 (Pemberdayaan terfokus pada kinerja), X_2 (Tim yang mampu kerjasama), X_3 (Pemimpin yang mempunyai visi), dan X_4 (Komunikasi yang baik variabel Y) adalah $0,515 + 0,104 - 0,252 + 0,319 = 0,686$ atau 68,60%. Berdasarkan Gambar 4.2 tersebut, dapat dikemukakan bahwa nilai korelasi antara X_1 dengan X_2 sebesar 0,053 yang bermakna terdapatnya hubungan korelatif yang sangat rendah antara keduanya. Artinya hubungan antara pemberdayaan terfokus pada kinerja dengan tim yang mampu kerjasama berkaitan satu sama lain, sehingga apabila pemberdayaan terfokus pada kinerja yang dimiliki kurang, akan berakibat kepada proses kerjasama dalam tim akan menjadi berkurang. Nilai korelasi antara X_1 dengan X_3 sebesar 0,681 yang bermakna terdapatnya hubungan korelatif yang cukup kuat antara keduanya artinya, pemberdayaan terfokus pada kinerja dengan pemimpin yang mempunyai visi organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok berkaitan satu sama lain, sehingga apabila pemberdayaan terfokus pada kinerja kurang akan berakibat kepada lemahnya pemimpin yang mempunyai organisasi dalam meningkatkan kinerja anggotanya.

Nilai korelasi antara X_1 dengan X_4 sebesar 0,393 yang bermakna terdapatnya hubungan korelatif yang rendah antara keduanya. Hal tersebut berarti bahwa hubungan antara pemberdayaan terfokus pada kinerja dengan komunikasi yang baik antar anggota dalam melaksanakan pemberdayaan Anggota DPRD Kota Depok berkaitan satu

sama lain. Sehingga apabila pemberdayaan terfokus pada kinerja yang menjadi acuan anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan rencana kerja, akan berakibat pada menurunnya pemberdayaan Anggota DPRD Kota Depok. Nilai korelasi antara X_2 dengan X_3 sebesar 0,645 yang bermakna terdapatnya hubungan korelatif yang cukup kuat antara keduanya. Hal ini berarti hubungan antara tim yang mampu kerjasama yang diberikan dalam melaksanakan pemberdayaan Anggota DPRD Kota Depok berkaitan satu sama lain. Sehingga apabila kerjasama tim tersebut tidak baik akan berakibat pada lemahnya pemimpin yang mempunyai visi organisasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa nilai korelasi antara X_2 dengan X_4 sebesar 0,652 yang bermakna terdapatnya hubungan korelatif yang cukup kuat antara keduanya artinya hubungan antara tim yang mampu kerjasama dalam melaksanakan pemberdayaan Anggota DPRD Kota Depok berkaitan satu sama lain.

Sehingga apabila tim yang mampu kerjasama dilaksanakan oleh DPRD Kota Depok tidak sesuai ketentuan akan berakibat pada lemahnya kerjasama antara sesama anggota dewan dan pelaksanaan pemberdayaan anggota dewan yang tidak berjalan sesuai ketentuan serta tidak tepatnya proses pemberdayaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengaruh yang diberikan oleh X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 secara bersama-sama mempengaruhi kinerja Anggota DPRD Kota Depok (Y) sebesar 68,60%, angka tersebut bermakna cukup kuat dan signifikan secara statistik. Adapun pengaruh variabel lain di luar variabel X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 dinyatakan oleh $pY\epsilon^2$, yaitu tingkat kepercayaan sebesar $(0,314)^2 = 0,0986$ atau sebesar 9,86%, diperkirakan berasal dari proses manajemen lainnya yang berada di lingkungan DPRD Kota Depok. Berikut adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh pemberdayaan Anggota DPRD Kota Depok terhadap kinerja Anggota DPRD Kota Depok dimaknai dengan sangat mutlak suatu

pemberdayaan harus dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kinerja. Hal tersebut terbukti bahwa pengaruh yang ditimbulkan cukup kuat sebesar 68,60%, sedangkan pengaruh lainnya (*epsilon*) terhadap kinerja yaitu sebesar 31,40% dan hal ini tidak dilakukan penelitian.

Terkait dengan faktor-faktor pemberdayaan Anggota DPRD Terfokus pada kinerja, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa DPRD Kota Depok tidak mempersoalkan tingkat pendidikan yang ada pada Anggota DPRD Kota Depok asalkan sesuai ketentuan yang berlaku, yang penting para anggota DPRD Kota Depok dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Para Anggota DPRD Kota Depok selalu menjalin komunikasi dengan sesamanya dan didukung pengalaman kerja yang ada serta penguasaan lapangan, sehingga pekerjaan yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan pekerjaan secara baik dapat juga didukung dengan adanya pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan kursus yang diberikan kepada Anggota DPRD Kota Depok. Selanjutnya, dalam memperbaiki hubungan dengan pemerintah daerah, Anggota DPRD Kota Depok telah melaksanakannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga hal tersebut akan dapat mendukung pelaksanaan tugas pekerjaan Anggota DPRD Kota Depok sehari-hari.

Selain memperbaiki hubungan dengan pemerintah daerah, para Anggota DPRD Kota Depok juga melaksanakan hubungan secara intens dengan masyarakatnya, yaitu dengan mengetahui dan memahami kebutuhan rakyat melalui kegiatan-kegiatan dalam bentuk pengamatan langsung di masyarakat atau dengan proses *hearing* bersama eksekutif pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang diberikan melalui kuesioner yang dapat mempengaruhi terfokusnya kegiatan Anggota DPRD Kota Depok pada kinerjanya. Ditunjukkan bahwa 15 orang (38,5%) menyatakan sangat setuju, 15 orang (38,5%) menyatakan setuju. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar Anggota

DPRD Kota Depok dapat mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahannya kepada masyarakat. Dengan demikian, terdapat proses pemenuhan kebutuhan informasi para Anggota DPRD Kota Depok baik berasal dari masyarakat dengan mengadakan peninjauan lapangan, serta kebutuhan informasi dari pemerintah daerah. Anggota DPRD Kota Depok ingin melakukan pekerjaan dengan baik. Organisasi yang memberdayakan membantu mereka untuk mendapatkannya. Terdapat dua perbedaan yang tajam, di satu sisi orang dapat jadi pemenang dalam suatu organisasi yang memberdayakannya. Di sisi lain, orang yang sama dapat menjadi orang yang kalah dalam organisasi yang tidak memberdayakannya (*a hamstrung organization*). Satu faktor kunci yang dapat membuat perbedaan adalah fokus organisasi pada kinerja.

Untuk setiap kelompok dalam setiap organisasi, ada pelanggan. Ini adalah salah satu konsep kualitas, dan memperbaiki hubungan pelanggan adalah pendekatan yang baik kepada kinerja. Bagian dari seni manajemen adalah membantu masyarakat mempelajari lebih mendalam tentang siapa pelanggan mereka dan apa yang mereka inginkan. Atas dasar hasil penelitian, menunjukkan bahwa terfokus pada aspek kinerja Anggota DPRD, untuk poin pernyataan memperbaiki hubungan dengan rakyat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Anggota DPRD memberikan jawaban yakni 12 orang (30,8%) menyatakan setuju, 10 orang (25,6%) menyatakan sangat setuju. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden (56,4%) memberikan persetujuannya terhadap harus diperbaikinya hubungan Anggota DPRD dengan rakyat atau masyarakat yang telah memilihnya. Selanjutnya terkait dengan tim yang mampu kerja sama, bahasan tentang hal ini dapat dikemukakan bahwa kerja sama merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mau dan dapat berada dalam tim yang

mempunyai pandangan yang sama. Tidak ada satu pun organisasi yang dapat mencapai tujuannya tanpa melalui kerja sama yang baik. Kerja sama itu sendiri merupakan hubungan yang serasi antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga tercipta hubungan yang saling membantu demi tercapainya tujuan.

Hubungan yang harmonis antar sesama Anggota DPRD Kota Depok dengan masyarakat yang diwakilinya, mutlak dibutuhkan. Hal tersebut dimaksudkan agar mampu mencapai tujuan dan sasarannya sebagai organisasi yang menjadi penyeimbang dan pengontrol kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok. Dari hasil penelitian juga dapat dikemukakan bahwa hubungan kerja antara Anggota DPRD Kota Depok dengan Pemda Kota Depok telah terjalin dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sikap yang saling membantu antara Anggota DPRD Kota Depok dengan aparat Kota Depok di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan baik yang datang dari Pemda Kota Depok, menindaklanjuti keinginan dan harapan masyarakat atau atas hak inisiatif yang dimiliki oleh DPRD Kota Depok untuk menghasilkan satu produk yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Selanjutnya, selain diperlukannya hubungan yang baik sesama Anggota DPRD Kota Depok dan hubungan dengan Pemda Kota Depok, hubungan dengan masyarakat yang diwakilinya pun perlu dijalin dengan baik. Untuk poin pernyataan adanya hubungan antara Anggota DPRD Kota Depok dengan masyarakat yang diwakilinya menunjukkan 18 orang (46,2%) menyatakan sangat setuju dan 13 orang (33,3%) menyatakan setuju. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar responden menilai adanya hubungan yang baik antara Anggota DPRD Kota Depok dengan masyarakat yang telah memilihnya menjadi Anggota DPRD Kota Depok. Hal ini dapat dimengerti dengan beragamnya latar belakang partai yang menempatkan para Anggota DPRD Kota Depok, yang salah satunya berkaitan dengan kepentingan partai yang mengusungnya dalam

menggolkan visi dan misi partai serta tuntutan masyarakat yang telah mendukungnya.

Dengan demikian keterlibatan Anggota DPRD Kota Depok dengan masyarakat menjadi indikasi terjadinya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebenarnya hubungan yang baik antara Anggota DPRD Kota Depok dengan masyarakat akan membawa pengaruh yang besar bagi tercapainya tujuan DPRD Kota Depok sebagai lembaga yang diisi oleh perwakilan masyarakat, guna dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya agar selalu berpihak pada masyarakat bukan terhadap keinginan Pemda Kota Depok semata melainkan kepada kebutuhan dasarnya yang lebih luas. Bahwa hubungan yang baik telah terjalin antara Anggota DPRD Kota Depok dengan masyarakat, yaitu dengan seringnya kunjungan dari Anggota DPRD Kota Depok pada masyarakat serta adanya komunikasi yang baik dan selalu berinteraksi dengan wakilnya di DPRD Kota Depok. Dikemukakan bahwa *real teams* merupakan awal dari terbangunnya kinerja, sebab kinerja yang baik berasal dari tim yang baik. Dalam masyarakat yang diberdayakan, jumlah lebih besar daripada bagian-bagian itulah sinergi. Itu juga merupakan dasar pemikiran finansial untuk berinvestasi dalam tim kerja yang baik. Tim kerja sangat penting melebihi batas-batas dari tim utama.

Lagi pula, tim kerja menunjukkan keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam suatu proses kegiatan. Terkait dengan pemimpin yang mempunyai visi, dapat dikemukakan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan oleh bawahan yang dipimpinnya serta berbagai resiko yang ditimbulkannya. Oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki berbagai kemampuan baik dalam bidang ilmu yang dipimpinnya maupun ilmu atau kemampuan manajemennya, sehingga mampu mempengaruhi yang dipimpinnya. Salah satu sumber daya yang dapat mempengaruhi orang lain adalah otoritas baik berupa kompetensi, jabatan

maupun pangkat. Seorang pemimpin dapat memiliki otoritas jika ia diangkat menjadi kepala unit kerja tertentu, pemimpin ini merupakan kriteria dari pemimpin formal dan kepemimpinannya disebut pemimpin formal. Pemimpin lain yang tidak memilikinya disebut pemimpin informal. Dalam operasional ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemimpin agar kepemimpinannya diharapkan dapat efektif. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dalam ruang kerjanya, sehingga suasana kerja dapat lebih nyaman dan kondusif, baik bagi sesama karyawan maupun terhadap pemimpin. Selanjutnya, terhadap masalah komunikasi yang baik adalah terkait dengan proses komunikasi untuk mensosialisasikan suatu permasalahan yang terjadi di DPRD Kota Depok. Dapat dikemukakan bahwa proses tersebut merupakan salah satu proses adaptasi yang diperuntukkan bagi Anggota DPRD Kota Depok dalam setiap melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, maka sosialisasi sebagai suatu proses adaptasi dapat diselenggarakan untuk membangun penerimaan dari suatu penyesuaian dan pembentukan dalam implementasi kebijakan dengan mengedepankan komunikasi sebagai sarana untuk saling tersambungannya antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain. Pemberian informasi mengenai program dan kebijakan DPRD Kota Depok. Dengan bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Depok melalui Sekretariat DPRD Kota Depok, dapat disimpulkan bahwa proses-proses sosialisasi telah menyentuh terhadap seluruh Anggota DPRD Kota Depok yang terlibat dalam program atau kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan para responden dalam penelitian ini. Dapat diartikan bahwa sedang dan terus berlangsungnya adaptasi dan penyesuaian diri yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Depok dalam menerima dan melaksanakan setiap kebijakan DPRD Kota Depok yang berhubungan dengan keberlangsungan tugas dan fungsinya.

Hal tersebut akan melahirkan komunikasi internal antara sesama Anggota DPRD Kota Depok yang bersifat dua arah, yaitu dengan Pemerintah Daerah dan dengan masyarakat. Sedangkan terkait dengan bahasan tentang kinerja Anggota DPRD Kota Depok dengan dimensi akuntabilitas, dapat dikemukakan bahwa sehubungan dengan akuntabilitas dalam pelayanan Anggota DPRD Kota Depok, baik kepada Pemerintah Daerah Kota Depok maupun masyarakat, pemahaman akan dapat disikapi dengan adanya wawancara pada Anggota DPRD Kota Depok dan kuesioner pada masyarakat setempat. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Anggota DPRD Kota Depok tetap memberikan kelonggaran dan jalan keluar (solusi) terhadap persyaratan yang harus dipenuhi (misalnya, terkait dengan proses perijinan yang harus melibatkan lembaga legislatif daerah), yang kurang lengkap dari masyarakat yaitu persyaratan yang ada akan tetap diproses dengan ketentuan bahwa masyarakat tetap memenuhi persyaratan yang kurang tersebut. Hal ini pun menunjukkan Anggota DPRD Kota Depok berpegang pada ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan adanya solusi yang diberikan terhadap kekurangan persyaratan, hal ini mendapat persetujuan dari responden bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa ada solusi yang diberikan terhadap persyaratan yang kurang lengkap yaitu 15 orang (36,6%) menyatakan sangat setuju dan sebanyak 15 orang (36,6%) menyatakan setuju.

Responden merasa bahwa persyaratan yang kurang tersebut tidak menjadi beban yang berat karena Anggota DPRD Kota Depok selalu memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan persyaratan tersebut. Jalan keluar yang dimaksudkan adalah menyumbangkan saran dan pikiran, bagaimana masyarakat dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh aturan yang ada. Selanjutnya, terkait dengan bahasan tentang dimensi responsivitas, dapat dikemukakan bahwa hal ini sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena responsivitas merupakan kemampuan

anggota DPRD Kota Depok untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Hal tersebut juga memiliki kemampuan untuk merespon atau peka terhadap apa yang menjadi tuntutan Pemerintah Daerah Kota Depok dan masyarakatnya. Dengan adanya kemampuan tersebut, maka akan tercipta suatu keselarasan antara Anggota DPRD Kota Depok dengan Pemerintah Daerah Kota Depok serta masyarakatnya. Terciptanya keselarasan antara DPRD Kota Depok dengan Pemerintah Daerah Kota Depok serta masyarakatnya yang akan memuaskan berbagai pihak, maka dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi tersebut menjadi baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil hasil penelitian bahwa DPRD Kota Depok melalui para anggotanya selalu membuka diri terhadap berbagai aspirasi masyarakat baik berupa saran, kritikan maupun keluhan-keluhan.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, terkadang masyarakat merasa segan bahkan takut untuk menyampaikan aspirasinya walaupun Anggota DPRD Kota Depok telah membuka dirinya untuk menerima aspirasi masyarakatnya. Biasanya masyarakat menyampaikan aspirasi melalui orang yang dipercayainya yaitu para tokoh masyarakat setempat. Oleh karenanya, perlu adanya usaha dari DPRD Kota Depok untuk mengenali dan memahami kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Depok dan masyarakatnya. Tindak lanjut terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat Kota Depok terhadap para Anggota DPRD Kota Depok dapat dijelaskan bahwa harapan masyarakat terhadap Anggota DPRD Kota Depok yang menginginkan tindak lanjut dari tuntutan dan kebutuhannya telah dilakukan oleh DPRD Kota Depok. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pengajuan dan pengesahan Peraturan Daerah ke Pemerintah Daerah Kota Depok. Selanjutnya terkait dengan bahasan tentang dimensi efisiensi, dapat dijelaskan bahwa pengertian efisiensi di sini adalah sebagai penghematan waktu dan biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Depok terhadap Pemerintah Daerah Kota Depok serta

masyarakat. Dengan adanya efisiensi pelayanan baik dalam segi waktu maupun biaya, maka Pemerintah Daerah Kota Depok dan masyarakat sebagai pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Hal ini terungkap dari hasil pengolahan data lapangan bahwa DPRD Kota Depok selalu menetapkan target penyelesaian tugasnya dengan memberikan kepastian waktu yang cepat dan tepat. Dengan demikian selalu dibangun komitmen yang menyatakan untuk menyelesaikan suatu urusan secepat mungkin dan menyediakan waktu di luar jam dinas, sehingga setiap aspirasi yang datang dari Pemerintah Daerah Kota Depok dan masyarakat dan harus diproses di DPRD Kota Depok dapat segera diselesaikan. Sedangkan untuk penggunaan anggaran secara selektif dalam melaksanakan tugas Anggota DPRD Kota Depok, dapat diketahui dari hasil penilaian responden yaitu 14 orang (34,1%) menyatakan sangat setuju dan 12 orang (29,3%) menyatakan setuju. Dari hasil penilaian ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai penggunaan anggaran secara selektif telah ditetapkan oleh DPRD Kota Depok. Penggunaan anggaran secara selektif merupakan yang harus dilakukan oleh suatu lembaga publik, agar tidak terjadi pemborosan keuangan negara. Dalam menerima aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Kota Depok diharapkan dapat memberikan sikap yang baik, karena masyarakat yang datang terdiri dari berbagai unsur dan lapisan masyarakat. Penilaian responden mengenai hal tersebut dapat diketahui bahwa 10 orang (24,4%) menyatakan sangat setuju dan 15 orang (36,6%) menyatakan setuju.

Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan adanya sikap yang baik dari Anggota DPRD Kota Depok dalam menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Terkait dengan bahasan tentang dimensi orientasi terhadap tugas, dapat dikemukakan bahwa Anggota DPRD Kota Depok yang melayani masyarakat harus memiliki orientasi terhadap tugas agar di saat Pemerintah Daerah Kota Depok

dan masyarakat memerlukan pelayanan dari tugas dan fungsi yang DPRD Kota Depok miliki, para Anggota DPRD Kota Depok telah siap memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Orientasi terhadap tugas, sebenarnya menunjuk pada ukuran seberapa sumber daya yang dimiliki oleh Anggota DPRD Kota Depok tersebut digunakan untuk melakukan proses penyelesaian setiap masalah yang dihadapinya. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa terdapat usaha dan upaya yang dilakukan Anggota DPRD Kota Depok untuk memberikan serta menunaikan tugasnya dengan kualitas terbaik, untuk kepentingan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai acuan pelaksanaan pemerintahan maupun memberikan solusi atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Anggota DPRD Kota Depok telah memberikan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan masyarakat pada umumnya dilakukan secara baik. Sebagai organisasi yang memberikan pelayanan kepada Pemerintah Daerah Kota Depok serta masyarakat, maka Anggota DPRD Kota Depok telah menunjukkan kinerja (*performance*) yang baik, agar Pemerintah Daerah Kota Depok dan masyarakatnya yang dilayani merasa terpuaskan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Anggota DPRD Kota Depok sebagai anggota organisasi legislatif daerah, telah memberikan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan baik. Sebagai organisasi yang memberikan pelayanan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka Anggota DPRD Kota Depok telah menunjukkan kinerja yang baik sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilayani merasa terpuaskan. Hasil dari data yang telah diperoleh melalui pencarian data lapangan, kinerja anggota DPRD Kota Depok dari aspek akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, orientasi terhadap tugas, dan fasilitas terhadap pelayanan pada Anggota DPRD Kota Depok secara akumulasi adalah baik. Kinerja

para Anggota DPRD Kota Depok yang baik tersebut, dapat dilihat dari aspek responsivitas, efisiensi dari segi biaya, serta orientasi terhadap tugas. Sedangkan untuk aspek lainnya yaitu akuntabilitas dan efisiensi dari segi waktu belum bisa dikatakan baik. Namun demikian, Anggota DPRD Kota Depok dengan kekurangan yang ada tetap bisa memberikan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Depok. Kinerja Anggota DPRD Kota Depok yang telah dicapai tidak datang dengan sendirinya, karena ada faktor-faktor lain yang menentukannya. Terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi kinerja (*performance*) para Anggota DPRD Kota Depok, sehingga hal ini pun harus mendapatkan perhatian dari lembaga legislatif daerah tersebut secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di lembaga legislatif daerah Kota Depok menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh pemberdayaan yang terfokus pada kinerja terhadap kinerja Anggota DPRD Kota Depok cukup signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemberdayaan yang terfokus pada kinerja seorang Anggota DPRD Kota Depok, akan semakin tinggi pula kinerjanya. Dengan demikian hipotesis ditolak, yang bermakna bahwa sebenarnya terdapat hubungan yang signifikan antara pemberdayaan terfokus pada kinerja dengan kinerja DPRD Kota Depok. Sedangkan pengaruh yang diberikan oleh tim yang mampu kerjasama terhadap kinerja Anggota DPRD Kota Depok terbukti tidak signifikan dengan nilai sangat kecil, meskipun arahnya positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tim yang mampu kerjasama akan semakin tinggi pula kinerjanya. Dengan demikian hipotesis ditolak, atau sebenarnya terdapat pula hubungan meskipun tidak signifikan antara tim yang mampu kerjasama dengan kinerja DPRD Kota Depok.

Berikut adalah pengaruh yang diberikan oleh pimpinan yang mempunyai visi terhadap kinerja Anggota DPRD Kota Depok terbukti

tidak signifikan dengan nilai sangat kecil dengan arah negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemimpin yang mempunyai visi yang ada di DPRD Kota Depok akan memberikan pengaruh buruk terhadap kinerja Anggota DPRD Kota Depok lainnya. Dengan demikian hipotesis diterima, atau sebenarnya tidak ada hubungan yang signifikan antara pemimpin yang mempunyai visi dengan kinerja DPRD Kota Depok. Terakhir adalah pengaruh yang diberikan

oleh komunikasi yang baik terhadap kinerja Anggota DPRD Kota Depok tidak signifikan, dengan nilai sangat kecil meskipun arahnya positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komunikasi yang baik diterapkan, akan semakin tinggi pula kinerjanya. Dengan demikian hipotesis ditolak, atau sebenarnya terdapat hubungan meskipun tidak signifikan antara komunikasi yang baik dengan kinerja DPRD Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Osborne, David, *et al.*, 1992, *Reinventing Government How The Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Addison-Wesley Publishing Company, New York.

Dwiyanto, Agus, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*,

Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Creswell, John W., 2002, *Research Design: Quantitative & Qualitative Approaches*. Sage Publication Inc., New York.

Kusnendi, 2004, *Analisis Jalur, Konsep, dan Aplikasi Dengan Program SPSS dan Lisrel 8*, Jurusan Pendidikan Ekonomi UPI, Bandung.